

**. ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DALAM  
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  
NOMOR.193/PID.SUS/2018/PN.KGN)**

**Muhamad Hafi Zakaria<sup>1</sup>, Akhmad Munawar<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810233

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1101087301

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1130038302

*Email: hafizakaria3039i@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tingginya jumlah kasus peredaran sabu dan penangkapan bandar narkoba internasional beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa Indonesia sedang menghadapi situasi krisis akibat narkoba. Narkotika adalah suatu jenis zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan.

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif, yaitu melalui analisis bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan serta kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yaitu:1) Pertimbangan hakim dalam putusan perkara 193/Pid.Sus/2018/PN.Kgn didasarkan pada pertimbangan yuridis, seperti Surat dakwaan, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan hukuman. Di samping itu, pertimbangan non-yuridis juga dipertimbangkan, seperti dampak merugikan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.2) Penerapan pasal 112 ayat (1) oleh hakim dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dianggap tepat berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, karena bukti di persidangan menunjukkan bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memiliki narkoba tersebut. Namun, ada argumen bahwa pasal 127 ayat (1) lebih sesuai, tetapi tidak didakwakan oleh penuntut umum. Meskipun terdakwa tetap terbukti bersalah, hal ini dianggap tidak adil bagi terdakwa dan tidak menguntungkan masyarakat. Seharusnya, hakim seharusnya mempertimbangkan penggunaan ancaman hukuman minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan cukup matang.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Narkotika, Pasal 112 Ayat (1), Penyalahgunaan Narkotika*

**ABSTRACT**

*Drug abuse continues to be a serious problem in Indonesia. The high number of cases of methamphetamine distribution and arrests of international drug dealers in recent years proves that Indonesia is facing a crisis situation due to drugs. Narcotics are a type of substance or drug that can come from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic in nature, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can cause dependence.*

*This study focuses on normative legal research, namely through an analysis of literature or secondary legal materials which consist of primary legal materials, with a statutory approach and a case approach. This approach is carried out by examining and studying all laws and regulations as well as cases related to the legal issues being faced.*

*The results of the study show several things, namely: 1) The judge's consideration in the decision of case 193/Pid.Sus/2018/PN.Kgn is based on juridical considerations, such as the indictment, the letter of demand from the public prosecutor, and evidence in the form of witness statements, letters, instructions, and statements of the suspect, as well as factors that can aggravate or lighten sentences. In addition, non-juridical considerations are also taken into account, such as the detrimental impact and damage to the social, national and state life order. 2) The application of Article 112 paragraph (1) by a judge with a prison sentence of 5 years and a fine of 1,000,000,000 (one billion rupiah) is considered appropriate based on the indictment of the public prosecutor, because the evidence at trial shows that the purpose of the defendant is to possess the narcotics. However, there is an argument that Article 127 paragraph (1) is more appropriate, but not charged by the public prosecutor. Even though the defendant is still proven guilty, this is considered unfair to the defendant and does not benefit society. Supposedly, the judge should have considered the use of the minimum penalty stipulated in the law with sufficient maturity.*

*Keywords: Narcotics Crime, Article 112 Paragraph (1), Drug Abusers*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Joe, dkk, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn)", *Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Painan*, Volume 8, Nomor 2, September 2021, hlm. 250. dapat diakses online pada <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/167/125/389>, tanggal 9 Mei 2022.
- Binus University Business Law, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Putusan Hakim", dapat diakses online pada <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kedudukan-yurisprudensi-dalam-putusan-hakim/>, 4 Agustus 2022.
- Damar Bastiar, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, hlm. 210. dapat diakses online pada <http://ejournal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/535/494>, tanggal 15 April 2022.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)", dapat diakses online pada [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161), 3 Agustus 2022.
- Endy Ronaldi, dkk, "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 142. Dapat diakses online pada <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/12152/10267>, 19 Juli 2022.
- Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm.20. Dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>, 1 September 2022.
- <https://media.neliti.com/media/publications/185730-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-pertimbangan-h.pdf>, 28 Juli 2022.
- K. Benuf, M Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 23. dapat diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, tanggal 18 April 2022.
- Kantor Pengacara, "Tiga Tujuan Hukum", dapat diakses online pada <https://kantorpengacara.id/tiga-tujuan-hukum/>, 26 Juli 2022.
- M. Yahya Harahap, (2005), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Rusli, (2006), *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Rani Juwita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)", *Jom Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 9. Dapat diakses online pada
- Roni Gunawan R.G, Nyoman Serikat P.J,"Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 337. dapat diakses online pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167/3116>, tanggal 9 Mei 2022.
- Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni
- Sri Dewi R, Yulia Monita,"Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika".*PAMPAS: Journal Of Criminal Law*", Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 127. dapat diakses online pada <https://repository.unja.ac.id/18577/1/Pampas%20Vol%201%20No%201.pdf> tanggal 20 Mei 2022.
- Sudarto, (1986) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni